

**POLITIK EKOLOGI DALAM MENGATASI PENCEMARAN
LINGKUNGAN (STUDI PADA DESA SRIGUNUNG
KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI
BANYUASIN)**

¹Deany Afriany*, ²Taufik Akhyar, ³Azis Fahrudin

¹²³Prodi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

¹deanyafriany_uin@radenfatah.ac.id, ²taufikakhyar_uin@radenfatah.ac.id,

³fahrudinazis403@gmail.com

*deanyafriany_uin@radenfatah.ac.id

Abstrcak

Pelitian ini berjudul “*Politik Ekologi dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan di (Studi pada Desa Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin)*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri kelapa sawit terhadap masyarakat Desa Srigunung serta mengkaji dinamika relasi kekuasaan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam perspektif politik ekologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas industri PT Srigunung Inti Argo Persada telah menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah yang berdampak langsung pada kesehatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Masyarakat Desa Srigunung mengalami penurunan kualitas hidup akibat limbah industri, namun memiliki daya tawar yang lemah karena dominasi kekuasaan perusahaan dan lemahnya penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah daerah. Dari perspektif politik ekologi, kondisi ini mencerminkan ketimpangan struktural dan ketidakadilan ekologis, di mana keuntungan ekonomi lebih diutamakan dibandingkan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan kebijakan lingkungan yang berpihak pada keadilan ekologis, peningkatan pengawasan pemerintah, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Politik Ekologi, Pencemaran Lingkungan, Desa Srigunung.

Abstract

This study is entitled "Ecological Politics in Addressing Environmental Pollution in A Study in Srigunung Village, Sungai Lilin District, Musi Banyuasin Regency)." The purpose of this study is to analyze the impact of environmental pollution caused by palm oil industry activities on the Srigunung Village community and to examine the dynamics of power relations between the company, the government, and the community from an ecological politics perspective. This study uses a qualitative approach with a case study method, using data collection techniques such as in-depth interviews, field observations, and documentation. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the industrial activities of PT Srigunung Inti Argo Persada have caused water, air, and soil pollution, which has a direct impact on the health and well-being of the surrounding community. The people of Srigunung Village experience a decline in their quality of life due to industrial waste, yet they have weak bargaining power due to the dominance of corporate power and weak enforcement of environmental law by the local government. From an ecological politics perspective, this condition reflects structural inequality and ecological injustice, where economic gain is prioritized over environmental sustainability and the community's right to a healthy environment. This research emphasizes the importance of implementing environmental policies that support ecological justice, increasing government oversight, and strengthening community participation in sustainable environmental management.

Keywords: *Ecological Politics, Environmental Pollution, Srigunung Village*

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan komoditas utama dalam sektor agribisnis di Indonesia yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit menyediakan lapangan kerja bagi jutaan masyarakat serta menjadi sumber devisa yang signifikan. Namun, di balik manfaat ekonominya, industri ini juga menghadirkan berbagai tantangan lingkungan yang serius, terutama terkait dengan limbah yang dihasilkan dalam proses pengolahannya (Firdaus & Pakpahan, 2020). Pencemaran lingkungan akibat limbah industri menjadi salah satu isu yang semakin mendapatkan perhatian global.

Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia menghadapi tantangan besar dalam mengelola dampak ekologis dari sektor ini. Studi oleh Wahyuni (2021) mencatat bahwa perluasan lahan sawit seringkali

menimbulkan pencemaran air, konflik agraria, dan hilangnya fungsi ekologis hutan tropis. Perusahaan-perusahaan besar di sektor ini kerap kali memiliki posisi dominan dalam politik lokal, mengakibatkan lemahnya pengawasan dan rendahnya penegakan hukum lingkungan.

Berbagai sektor industri menyumbang dampak yang signifikan terhadap lingkungan, termasuk industri kelapa sawit yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini menghasilkan berbagai jenis limbah yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari ekosistem sekitar. Pencemaran yang ditimbulkan berkontribusi terhadap degradasi lingkungan, yang mencakup pencemaran air, udara dan penurunan kualitas tanah. Hal ini menjadi perhatian serius dalam berbagai penelitian lingkungan karena dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek ekologis, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri kelapa sawit (Agostinho & Zucaro, 2025).

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu persoalan krusial dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami tekanan akibat aktivitas industri. Salah satu bentuk pencemaran yang kerap terjadi adalah pencemaran limbah industri, yang tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan, mata pencaharian, dan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Limbah industri kelapa sawit yang tidak dikelola dengan baik memiliki dampak ekologis yang signifikan. Pencemaran air tanah akibat limbah industri dapat menyebabkan eutrofikasi di perairan sekitar dan merusak biodiversitas ekosistem lokal. Selain itu, pencemaran ini juga dapat meningkatkan risiko bencana ekologis seperti banjir dan degradasi lahan, yang semakin memperburuk kondisi lingkungan yang sudah rentan. Jika tidak ada langkah mitigasi yang efektif, dampak lingkungan ini akan semakin sulit dikendalikan dan dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang lebih kompleks (London et al., 2025).

Dampak pencemaran limbah kelapa sawit sangat terasa di wilayah pedesaan yang menjadi lokasi dominan perkebunan dan pabrik pengolahan sawit. Warga mengalami penurunan kualitas hidup akibat tercemarnya air sungai yang menjadi sumber kehidupan, terganggunya kegiatan pertanian, serta munculnya penyakit kulit dan gangguan pernapasan. Pencemaran ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap industri yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan.

KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini Adalah Teori Ekologi Politik

MEkologi Politik merupakan pendekatan teoritis yang muncul sebagai respons terhadap kelemahan teori-teori lingkungan konvensional yang cenderung mengabaikan aspek sosial dan politik dalam analisis kerusakan lingkungan. Pendekatan ini menggabungkan elemen dari ekologi, ilmu politik, ekonomi, dan sosiologi untuk memahami bahwa krisis lingkungan tidak terjadi secara netral, melainkan sangat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kebijakan, serta struktur sosial yang melingkupinya. Konsep inti dari *political ecology* adalah bahwa degradasi lingkungan dan distribusi sumber daya alam tidak dapat dilepaskan dari

konflik sosial dan ketimpangan struktural. Dalam konteks ini, kerusakan lingkungan seperti pencemaran air atau udara bukanlah semata hasil dari kelalaian teknis, melainkan refleksi dari ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, regulasi, dan pembagian manfaat serta risiko.

Salah satu kontribusi penting dalam pendekatan ini berasal dari Bryant dan Bailey (1997), yang merumuskan tiga asumsi dasar *political ecology*.

1. Dampak dari perubahan atau kerusakan lingkungan tidak bersifat merata secara sosial; kelompok masyarakat miskin atau terpinggirkan umumnya menanggung beban ekologis yang lebih besar dibanding kelompok yang lebih kuat secara ekonomi dan politik.
2. Perubahan lingkungan bukan hanya proses alamiah atau teknis, melainkan erat kaitannya dengan dinamika politik dan ekonomi, seperti konflik atas penguasaan lahan, kebijakan industri, serta praktik korporasi.
3. Distribusi manfaat dan beban lingkungan selalu mengandung implikasi politik yang signifikan, karena menyangkut siapa yang mendapatkan keuntungan dan siapa yang menanggung kerugian dari eksploitasi lingkungan.

Dalam kerangka ini, pencemaran yang terjadi di Desa Srigunung dapat dianalisis sebagai manifestasi ketimpangan struktural antara korporasi PT Srigunung Inti Argo Persada dan Negara, melalui regulasi dan pengawasan, dan masyarakat lokal. Sementara itu, Robbins (2004) memperluas pendekatan *political ecology* dengan menekankan pentingnya analisis trans-disipliner. Ia menggabungkan pendekatan ekonomi-politik dengan ekologi budaya untuk memahami maladaptasi dan kerusakan lingkungan sebagai bagian dari struktur kekuasaan global dan lokal. Robbins juga menyoroti bagaimana narasi pembangunan sering digunakan untuk melegitimasi eksploitasi sumber daya dan marginalisasi masyarakat lokal. Dalam konteks ini, peran wacana dominan seperti "investasi daerah", "pertumbuhan ekonomi", atau "penyerapan tenaga kerja" sering menutupi kenyataan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dialami oleh masyarakat sekitar industri. Dengan demikian, pendekatan Robbins memberi alat kritis untuk melihat bagaimana lingkungan menjadi arena pertarungan ideologi dan kuasa.

Political Ecology, dengan seluruh konstruksi teoritisnya, sangat relevan digunakan dalam menganalisis kasus pencemaran oleh PT Srigunung Inti Argo Persada. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengkaji tidak hanya dampak lingkungan secara fisik, tetapi juga memahami bagaimana keputusan politik, kekuasaan ekonomi, dan resistensi masyarakat lokal saling berkaitan dalam membentuk kondisi ekologis di Desa Srigunung. Dengan *political ecology*, pencemaran lingkungan dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari sistem produksi kapitalistik dan regulasi negara yang cenderung memihak kepentingan ekonomi dibanding keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial. Oleh karena itu, landasan teori ini menjadi pijakan utama dalam membedah dimensi struktural, historis, dan politis dari masalah pencemaran lingkungan yang tengah diteliti.

Ekologi politik merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis ekologis dengan perspektif politik dan ekonomi. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada bagaimana kekuasaan, distribusi sumber daya, dan kebijakan pembangunan mempengaruhi kondisi lingkungan dan menciptakan

ketimpangan sosial. Seperti ditegaskan Robbins (2004), “semua konflik lingkungan adalah konflik politik” sebuah pernyataan yang menempatkan konflik ekologis dalam ranah perjuangan kepentingan dan kekuasaan.

Dalam konteks ini, Ekologi Politik melihat pencemaran lingkungan sebagai hasil dari ketimpangan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam. Ia mempertanyakan narasi dominan yang sering kali dibentuk oleh negara dan perusahaan, serta membuka ruang bagi narasi tandingan yang berasal dari masyarakat lokal. Fenomena pencemaran lingkungan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis atau ekologis. Di balik kerusakan lingkungan, terdapat relasi kuasa yang menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Oleh karena itu, pendekatan politik ekologi menjadi sangat relevan dalam menelaah dinamika konflik yang melibatkan Masyarakat, Negara, Dan Korporasi dalam konteks pencemaran lingkungan. Politik Ekologi Suatu Pendekatan Kritis

Dalam kasus ini, PT Srigunung Inti Argo Persada menguasai lahan dalam skala besar untuk kegiatan agroindustri. Perusahaan memiliki kendali penuh terhadap penggunaan dan pengelolaan lingkungan sekitar, sementara masyarakat hanya menjadi pihak yang terkena dampak. Teori politik ekologi menyoroti ketimpangan seperti ini sebagai bentuk marginalisasi ekologis, di mana kelompok yang paling dekat dengan sumber daya justru paling tidak memiliki kuasa atasnya (Blaikie & Brookfield, 1987).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitan Kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena pencemaran limbah dan bagaimana berbagai aktor, seperti masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, meresponsnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan dinamika sosial dalam isu lingkungan (Shulthoni et al., 2025). Metode studi kasus dipilih untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap dampak pencemaran industri kelapa sawit oleh PT Srigunung inti argo persada di Desa srigunung. Studi kasus memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pencemaran lingkungan dan efektivitas kebijakan lingkungan di tingkat lokal (Gherghina & Simionescu, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Srigunung akibat aktivitas operasional PT Srigunung Inti Argo Persada dalam kerangka Politik ekologi. Selain itu, penelitian ini berfokus pada penjelasan mengenai dampak pencemaran terhadap kualitas lingkungan, khususnya air, udara, dan tanah, serta implikasinya terhadap keberlanjutan ekosistem desa. Lebih jauh, penelitian ini menguraikan dampak pencemaran terhadap kehidupan masyarakat, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai beban yang ditanggung oleh warga.

Jika dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Ekologi Politik dari Bryant dan Bailey yang menjelaskan hubungan antara lingkungan kekuasaan dan politik. Memiliki 3 indikator utama Penelitian ini juga berupaya mengevaluasi upaya dan strategi yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah daerah, maupun masyarakat dalam mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan yang muncul.

A. Pencemaran Lingkungan di Desa Srigunung dalam Perspektif Ekologi Politik.

Pencemaran lingkungan di Desa Srigunung dapat dipahami bukan hanya sebagai persoalan teknis atau alamiah, melainkan sebagai masalah politik ekologi yang berakar pada relasi kuasa dan kebijakan pembangunan. Dalam perspektif politik ekologi, kerusakan lingkungan desa umumnya lahir dari tarik-menarik kepentingan antara negara, perusahaan, dan masyarakat lokal. Pendekatan ekologi politik sendiri memiliki tiga indikator yaitu sebagai berikut.

1. Dampak dari perubahan atau kerusakan lingkungan tidak bersifat merata secara sosial; kelompok masyarakat miskin atau terpinggirkan umumnya menanggung beban ekologis yang lebih besar dibanding kelompok yang lebih kuat secara ekonomi dan politik.

Pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Srigunung dapat dijelaskan melalui perspektif ekologi politik, yaitu cara pandang yang melihat hubungan antara kekuasaan, ekonomi, dan lingkungan. Dalam pandangan ini, kerusakan lingkungan tidak dianggap sebagai masalah alam semata, melainkan sebagai hasil dari kebijakan ekonomi dan struktur kekuasaan yang tidak adil. Ekologi politik menyoroti bahwa setiap perubahan lingkungan selalu melibatkan pertarungan kepentingan, di mana kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik seringkali memperoleh keuntungan, sedangkan kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan justru menanggung akibatnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berupaya menjaga posisi yang netral dan kolaboratif dalam menanggapi persoalan lingkungan di Desa Srigunung. DLH menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan pelanggaran berat dari pihak industri, karena perusahaan di wilayah tersebut telah memiliki izin lingkungan dan menjalankan pengelolaan limbah sesuai prosedur yang berlaku. Meskipun demikian, DLH tetap mendorong peningkatan standar pengelolaan lingkungan agar perusahaan tidak hanya mematuhi aturan administratif, tetapi juga benar-benar menjaga kualitas lingkungan di sekitar wilayah operasinya.

DLH juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat lokal yang kehidupannya bergantung pada sumber daya alam di sekitar kawasan industri. Setiap laporan dari warga akan tetap ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang objektif dan berbasis data, untuk memastikan tidak ada kesimpulan yang bersifat sepihak. Secara keseluruhan, DLH menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Sikap ini menunjukkan upaya lembaga tersebut untuk menjadi mediator yang adil di tengah dinamika kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ekologi di Desa Srigunung.

Di Desa Srigunung, pencemaran disebabkan oleh berbagai aktivitas seperti pembuangan limbah industri dan pengelolaan buah kelapa sawit. Dampak dari pencemaran ini tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelompok masyarakat miskin yang tinggal di sekitar sumber pencemaran menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka kehilangan, kesehatan yang terganggu akibat udara yang tercemar. Sementara itu, kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik seperti pengusaha, pemodal, atau pihak yang mengeluarkan izin usaha sering kali tidak merasakan dampak langsung karena mereka tinggal jauh dari lokasi pencemaran dan memiliki sumber daya untuk melindungi diri

Sementara itu, pihak yang memiliki kekuasaan dan modal seperti pemerintah daerah dan perusahaan justru dianggap lebih diuntungkan, baik secara ekonomi maupun politik. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan lingkungan, di mana kelompok masyarakat miskin menanggung beban ekologis paling besar, sedangkan kelompok berkuasa cenderung terlindungi dari dampaknya. Warga berharap ada tindakan nyata dari pemerintah dan perusahaan untuk memperbaiki kondisi lingkungan serta melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan yang menyangkut kelestarian Desa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan sosial dan kekuasaan sangat memengaruhi siapa yang paling menderita akibat kerusakan lingkungan. Masyarakat miskin di Srigunung sering kali tidak memiliki akses terhadap informasi, perlindungan hukum, maupun sarana untuk menuntut keadilan lingkungan. Mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam menghadapi perusahaan atau kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada kepentingan ekonomi. Akibatnya, mereka menanggung beban ekologis yang lebih besar, sementara keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam justru dinikmati oleh kelompok berkuasa.

Dalam kerangka politik ekologi, situasi di Desa Srigunung menggambarkan bahwa pencemaran lingkungan adalah bentuk ketidakadilan sosial. Kerusakan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari ketimpangan akses terhadap sumber daya, perbedaan kekuasaan, dan kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat kecil. Oleh karena itu, penyelesaian masalah pencemaran di Srigunung tidak cukup hanya dengan teknologi pengendalian limbah atau penegakan hukum, tetapi juga harus melibatkan reformasi sosial dan politik. Masyarakat lokal perlu diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan, memperoleh hak atas sumber daya alam, dan mendapatkan perlindungan dari dampak pencemaran yang tidak mereka sebabkan.

Dengan demikian, perspektif politik ekologi membantu kita memahami bahwa pencemaran lingkungan di Desa Srigunung adalah hasil dari ketimpangan kekuasaan dan ekonomi, di mana kelompok miskin menjadi korban utama dari kebijakan yang tidak adil. Untuk mencapai keadilan lingkungan, diperlukan perubahan dalam cara pandang dan pengambilan keputusan yang lebih demokratis, partisipatif, dan berpihak pada masyarakat yang selama ini menanggung beban ekologis terbesar.

2. Perubahan lingkungan bukan hanya proses alamiah atau teknis, melainkan erat kaitannya dengan dinamika politik dan ekonomi, seperti konflik atas penguasaan lahan, kebijakan industri, serta praktik korporasi.

Pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Srigunung tidak dapat dipahami hanya sebagai proses alamiah atau masalah teknis semata, melainkan harus dilihat melalui perspektif ekologi politik yang menyoroti keterkaitan erat antara perubahan lingkungan dengan dinamika kekuasaan, ekonomi, dan kebijakan publik. Dalam konteks ini, perusakan lingkungan sering kali muncul sebagai akibat dari konflik penguasaan lahan antara masyarakat lokal, pemerintah, dan korporasi. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau tambang, misalnya, kerap dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara partisipatif, sehingga menimbulkan ketimpangan akses terhadap sumber daya alam dan memicu konflik sosial.

Kebijakan industri yang pro-investasi dari pemerintah turut memperburuk kondisi lingkungan. Demi pertumbuhan ekonomi, izin eksploitasi lahan dan sumber daya sering diberikan kepada perusahaan besar tanpa pengawasan lingkungan yang memadai. Praktik ini menunjukkan bahwa negara berperan sebagai aktor politik yang justru memperkuat ketimpangan ekologis. Korporasi pun menjadi pelaku utama dalam akumulasi modal melalui eksploitasi sumber daya dan pembuangan limbah yang mencemari air serta tanah. Dalam pandangan ekologi politik, situasi ini mencerminkan sistem ekonomi ekstraktif, di mana keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara masyarakat lokal menanggung dampak ekologis dan sosialnya.

Selain itu, warga merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan menganggap pengawasan pemerintah terhadap aktivitas industri sangat lemah. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal, di mana kepentingan ekonomi lebih diutamakan dibandingkan keseimbangan ekologis dan kesejahteraan warga. Dalam perspektif ekologi politik, kondisi ini menggambarkan praktik ekonomi ekstraktif yang memperkuat ketidakadilan ekologis: keuntungan dinikmati oleh korporasi, sementara beban lingkungan ditanggung oleh masyarakat lokal.

Akibat pencemaran tersebut, masyarakat Desa Srigunung mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya masalah kesehatan. Kondisi ini memperdalam kemiskinan struktural, karena masyarakat kehilangan kemandirian ekonomi akibat degradasi sumber daya alam. Namun, di tengah tekanan tersebut, muncul gerakan perlawanan masyarakat lokal berupa advokasi lingkungan dan penolakan terhadap izin industri yang merugikan. Gerakan ini dikenal sebagai bentuk ekologi rakyat, yang menegaskan bahwa keadilan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial. Dengan demikian, pencemaran di Desa Srigunung merupakan manifestasi dari ketimpangan kekuasaan dan ekonomi, bukan sekadar akibat teknis, sehingga penyelesaiannya harus bersifat struktural dan partisipatif, dengan memperkuat hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan berkelanjutan.

3. Distribusi manfaat dan beban lingkungan selalu mengandung implikasi politik yang signifikan, karena menyangkut siapa yang mendapatkan keuntungan dan siapa yang menanggung kerugian dari eksploitasi lingkungan. Pencemaran

lingkungan yang terjadi di Desa Srigunung dapat dijelaskan melalui perspektif ekologi politik yang menyoroti hubungan antara kekuasaan, ekonomi, dan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dalam konteks ini, pencemaran tidak hanya dipahami sebagai masalah ekologis semata, tetapi juga sebagai akibat dari ketimpangan dalam distribusi manfaat dan beban lingkungan. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik, seperti pemilik modal atau perusahaan, sering kali memperoleh keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam. Sebaliknya, masyarakat lokal, terutama petani kecil dan warga yang bergantung pada sumber daya alam, justru menanggung beban ekologis berupa pencemaran air, tanah, dan udara. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari kegiatan produksi tidak dinikmati secara merata, sementara dampak negatifnya tersebar luas di kalangan masyarakat desa.

Dalam perspektif ekologi politik, distribusi manfaat dan beban lingkungan selalu mengandung implikasi politik yang signifikan karena menyangkut siapa yang mendapatkan keuntungan dan siapa yang menanggung kerugian. Pemerintah daerah yang memberikan izin usaha sering kali mendapatkan keuntungan berupa pendapatan asli daerah atau dukungan politik dari investor. Namun, proses pengambilan keputusan tersebut sering kali dilakukan tanpa partisipasi masyarakat desa, sehingga melahirkan ketidakadilan ekologis. Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan politik menjadi pihak yang paling dirugikan karena mereka harus hidup dalam kondisi lingkungan yang tercemar dan mengalami penurunan kualitas hidup.

Kasus di Desa Srigunung mencerminkan realitas yang serupa dengan berbagai peristiwa pencemaran di wilayah lain di Indonesia, seperti pencemaran Sungai Citarum dan daerah pertambangan di Kalimantan Timur. Dalam semua kasus tersebut, pihak yang berkuasa menikmati hasil ekonomi, sedangkan masyarakat lokal kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, pencemaran di Desa Srigunung tidak dapat dipandang sebagai kegagalan teknis dalam pengelolaan limbah semata, melainkan sebagai hasil dari ketimpangan kekuasaan yang mencerminkan ketidakadilan ekologis. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, transparansi dalam pemberian izin lingkungan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pencemaran agar keadilan ekologis dapat terwujud secara nyata di tingkat desa.

Dalam penelitian berjudul “Politik Ekologi dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Sungai Lilin (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Srigunung oleh PT Srigunung Inti Argo Persada) ketiga indikator utama dalam perspektif ekologi politik yakni ketimpangan sosial terhadap dampak lingkungan, keterkaitan antara perubahan lingkungan dengan dinamika politik dan ekonomi, serta ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan beban lingkungan terlihat saling berkaitan dan memberikan gambaran nyata mengenai ketimpangan ekologis yang terjadi di Desa Srigunung. Secara keseluruhan, ketiga indikator tersebut menggambarkan bahwa pencemaran lingkungan di Desa Srigunung tidak hanya merupakan masalah teknis pengelolaan limbah, melainkan juga hasil dari ketimpangan kekuasaan dan ekonomi. Untuk

mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang lebih adil, demokratis, dan partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat pengawasan terhadap industri, serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

B. Dampak pencemaran lingkungan yang di timbulkan dari PT SIAP terhadap kehidupan masyarakat

Dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri pengolahan kelapa sawit PT Srigunung Inti Argo Persada (PT SIAP) terhadap kehidupan masyarakat Desa Srigunung sangatlah kompleks dan luas. Pencemaran yang terjadi tidak hanya memengaruhi kondisi fisik lingkungan, tetapi juga membawa konsekuensi langsung terhadap aspek Sosial, Ekonomi Dan Ekologis Masyarakat Setempat.

1. Dampak Secara Ekonomi

Industri kelapa sawit yang mencemari lingkungan membawa dampak serius terhadap keberlanjutan ekonomi lokal. Masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidup pada sumber daya alam, kini menghadapi ketidak pastian ekonomi. Salah satu dampak pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Srigunung, Kecamatan Sungai Lilin, akibat aktivitas industri pengolahan kelapa sawit oleh PT Srigunung Inti Argo Persada memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.

Limbah yang mengandung zat kimia organik dan anorganik, seperti minyak, lemak, serta senyawa fenol yang bersifat toksik bagi biota perairan. Penurunan kualitas air menyebabkan air sungai tidak lagi layak digunakan dan dapat membunuh satwa yang tinggal di dalamnya.

Seiringan juga dengan dampak pencemaran lingkungan yang di timbulkan oleh PT SIAP di Desa Srigunung, kehadiran PT SIAP juga membawa dampak ekonomi yang positif untuk masyarakat yang tinggal di Desa Srigunung,

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tengah berupaya secara maksimal untuk menekan angka pengangguran terbuka di daerahnya. Salah satu langkah strategis yang ditempuh ialah menjalin kerja sama dengan PT SIAP, sebuah perusahaan yang berkomitmen untuk menerima serta memprioritaskan tenaga kerja lokal asal Muba. Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan pekerjaan dan pembangunan kolaborasi dengan pihak industri.

Upaya tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran, tetapi juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya peluang kerja bagi masyarakat lokal, roda perekonomian di tingkat desa dan kecamatan dapat bergerak lebih dinamis, sehingga menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, kerja sama ini juga memperkuat peran masyarakat dalam kegiatan industri di wilayah Muba, serta menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan sektor

swasta dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran PT SIAP di Desa Srigunung memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal. Perusahaan tersebut memberikan prioritas bagi warga Desa Srigunung untuk bekerja dibandingkan dengan pelamar dari desa lain, sehingga membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi angka pengangguran di desa, tetapi juga meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan warga. Dengan demikian, keberadaan PT SIAP dapat dianggap sebagai bentuk kontribusi nyata perusahaan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas ialah keberadaan PT SIAP di Desa Srigunung memberikan dampak positif, khususnya dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Sekitar 20% warga desa kini bekerja di perusahaan tersebut, sehingga membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, BUMDES Srigunung turut diberdayakan dalam pengelolaan bongkar muat buah kelapa sawit, yang menambah pendapatan desa. Kehadiran perusahaan juga mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal dan memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak desa dan industri. Dampak positif lainnya juga dirasakan oleh pedagang yang merasakan dampak positif oleh kehadiran Pt SIAP.

Dari hasil wawancara dengan warga di Desa Srigunung dapat disimpulkan bahwa keberadaan PT SIAP di Desa Srigunung memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat lokal, khususnya bagi pelaku usaha kecil seperti pedagang sembako. Aktivitas karyawan perusahaan yang berbelanja di warung warga membantu meningkatkan pendapatan dan menggerakkan roda perekonomian desa. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal apabila mampu menciptakan efek berganda bagi masyarakat sekitar.

Namun demikian juga pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Meskipun kehadiran perusahaan membawa manfaat ekonomi, perhatian terhadap dampak lingkungan tetap harus menjadi prioritas agar pembangunan yang terjadi bersifat berkelanjutan dan tidak merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Hal ini memperlihatkan salah satu bentuk nyata kontribusi PT Srigunung Inti Argo Persada (SIAP) terhadap masyarakat di Desa Srigunung. Kontribusi ini tidak hanya mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap kebutuhan sosial warga, tetapi juga menunjukkan adanya upaya untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara pihak perusahaan dengan masyarakat lokal.

Manfaat langsung baik dalam aspek sosial maupun ekonomi, misalnya berupa peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana, dukungan pada kegiatan sosial, maupun peluang kerja bagi penduduk sekitar. Dengan demikian, meskipun keberadaan perusahaan kerap menimbulkan persoalan lingkungan, kontribusi seperti yang ditampilkan dalam gambar tersebut menjadi salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

2. Dampak Secara sosial

Secara sosial, pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri pengolahan kelapa sawit PT Srigunung Inti Argo Persada (PT SIAP) telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Desa Srigunung. Pencemaran udara dan tanah yang dihasilkan dari aktivitas pengelolaan buah kelapa sawit berdampak pada terganggunya pemenuhan kebutuhan dasar warga, seperti ketersediaan air bersih dan kualitas udara yang sehat. Akibatnya masyarakat tidak hanya mengalami kerugian materi berupa bertambahnya biaya hidup karena untuk memperoleh air bersih, dan juga menghadapi penurunan kualitas hidup sehari-hari.

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencemaran udara yang dihasilkan dari proses pembakaran cangkang sawit dan limbah pabrik menimbulkan emisi gas berbahaya seperti karbon monoksida sulfur dioksida dan partikel debu keberadaan partikel-partikel ini menyebabkan menurunnya kualitas udara dan berpotensi memicu gangguan pernapasan, iritasi mata, serta penyakit paru-paru kronis. Kondisi ini terutama berdampak pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia yang memiliki daya tahan tubuh lebih lemah, secara ekologis, meningkatnya konsentrasi gas pencemar di atmosfer juga dapat mengganggu keseimbangan dari vegetasi sekitar, menghambat fotosintesis, dan dapat menurunkan produktivitas lahan pertanian warga.

Pabrik kelapa sawit oleh PT SIAP telah menimbulkan pencemaran udara yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Bau tidak sedap yang muncul, seperti bau jagung rebus atau bau lengur dari proses pengolahan, menyebabkan ketidaknyamanan dan gangguan kualitas hidup warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah udara dari pabrik belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan sistem pengendalian emisi dan pengolahan limbah udara, agar kegiatan produksi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Ekosistem mengalami kerusakan akibat pencemaran lingkungan, kehidupan masyarakat akan terganggu secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan hidup manusia sangat erat kaitannya dengan keseimbangan ekosistem, di mana rusaknya satu komponen lingkungan dapat memicu ketidakseimbangan yang berdampak luas terhadap aspek lain.

Dampak pencemaran yang ditimbulkan PT SIAP tidak hanya terbatas pada penurunan kualitas lingkungan, tetapi juga merembet pada kesehatan masyarakat. Meningkatnya kasus gangguan pernapasan, iritasi kulit, hingga melemahnya daya tahan tubuh menjadi persoalan serius, terlebih bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Kondisi ini menambah beban sosial-ekonomi masyarakat, karena mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengobatan serta menghadapi keterbatasan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, rasa cemas dan ketidaknyamanan akibat kondisi lingkungan yang tercemar juga menurunkan kualitas kesejahteraan psikologis masyarakat.

Meskipun keberadaan perusahaan membawa keuntungan dari sisi ekonomi, terutama melalui kontribusi pada pendapatan daerah dan lapangan kerja, kenyataannya kerugian ekologis, sosial, dan kesehatan yang ditanggung masyarakat juga setara dengan apa yang masyarakat rasakan. Situasi ini

memperlihatkan adanya ketimpangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kerusakan ekologis akan semakin parah dan kesejahteraan masyarakat Desa Srigunung akan semakin terancam dalam jangka panjang.

3. Dampak Secara Ekologis

Secara ekologis, pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Srigunung akibat aktivitas industri pengolahan kelapa sawit oleh PT Srigunung Inti Argo Persada PT SIAP menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem di wilayah Desa Srigunung. Limbah cair hasil produksi yang mengalir ke badan sungai menyebabkan penurunan kualitas air dan kematian biota perairan, seperti ikan dan organisme kecil yang sebelumnya menjadi bagian penting dari rantai ekologi lokal. Selain itu, aktivitas pembakaran limbah padat di area pabrik turut berkontribusi terhadap pencemaran udara yang mengandung partikel debu dan gas berbahaya, sehingga memengaruhi vegetasi di sekitar kawasan industri.

Pencemaran udara yang dihasilkan dari proses pembakaran cangkang sawit dan limbah pabrik menimbulkan emisi gas berbahaya seperti karbon monoksida sulfur dioksida dan partikel debu keberadaan partikel-partikel ini menyebabkan menurunnya kualitas udara dan berpotensi memicu gangguan pernapasan, iritasi mata, serta penyakit paru-paru kronis. Kondisi ini terutama berdampak pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia yang memiliki daya tahan tubuh lebih lemah, secara ekologis, meningkatnya konsentrasi gas pencemar di atmosfer juga dapat mengganggu keseimbangan dari vegetasi sekitar, menghambat fotosintesis, dan dapat menurunkan produktivitas lahan pertanian warga.

Bau menyengat yang terus menerus muncul dari proses pengolahan kelapa sawit, kebisingan mesin pabrik, serta udara yang semakin tercemar telah mengganggu kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat Desa Srigunung. Aktivitas harian seperti menjemur pakaian, berinteraksi di luar rumah, hingga kegiatan sosial masyarakat kini menjadi terbatas karena lingkungan tidak lagi memberikan rasa aman dan nyaman.

Kondisi ekologis yang terjaga dengan baik, masyarakat seharusnya dapat menjalani kehidupan secara layak karena ekosistem yang sehat berfungsi sebagai penopang utama kesejahteraan manusia. Lingkungan yang bersih dan seimbang menyediakan air yang layak konsumsi, udara segar, tanah subur, serta keanekaragaman hayati yang menjadi sumber pangan dan ekonomi bagi warga. Namun, ketika keseimbangan ekologi terganggu akibat aktivitas industri yang tidak ramah lingkungan, masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya tersebut dan menghadapi tekanan sosial-ekonomi yang semakin besar.

PT Srigunung Inti Argo Persada (PT SIAP) memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dari sisi ekonomi, keberadaan perusahaan memang memberikan kontribusi positif berupa peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa, serta bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar pabrik. Namun demikian, pencemaran lingkungan yang ditimbulkan menyebabkan penurunan kualitas sumber daya alam seperti air dan ikan, sehingga masyarakat

harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kehilangan sebagian mata pencaharian yang bergantung pada sumber daya alam.

Dari aspek sosial, pencemaran udara, bau menyengat, dan kebisingan mesin pabrik menurunkan kenyamanan serta kualitas hidup warga, bahkan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan seperti sesak napas, iritasi kulit, dan penyakit pernapasan. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya posisi tawar masyarakat terhadap perusahaan dan pemerintah daerah, yang menyebabkan munculnya ketidakadilan ekologis di mana masyarakat harus menanggung beban pencemaran tanpa kompensasi yang sepadan.

Sementara itu, dari aspek ekologis, kegiatan operasional pabrik berdampak pada kerusakan ekosistem melalui pembuangan limbah cair ke aliran sungai yang menyebabkan air berwarna hitam, berbau menyengat, dan mematikan biota perairan, serta pembakaran limbah padat yang mengakibatkan pencemaran udara dan menurunkan produktivitas lahan pertanian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan PT SIAP di Desa Srigunung menimbulkan dampak multidimensional yang saling berkaitan, di mana manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat tidak sebanding dengan kerugian sosial dan ekologis yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari perspektif politik ekologi, persoalan pencemaran lingkungan di Desa Srigunung bukan semata-mata disebabkan oleh faktor teknis atau kelalaian dalam pengelolaan limbah industri, tetapi merupakan akibat dari ketimpangan relasi kekuasaan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Pemerintah daerah cenderung bersikap pasif dan kurang tegas dalam menegakkan hukum lingkungan, sementara masyarakat memiliki posisi tawar yang lemah dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Kondisi ini menggambarkan adanya ketidakadilan ekologis, di mana kepentingan ekonomi dan akumulasi keuntungan perusahaan lebih diutamakan dibandingkan dengan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa proses produksi industri kelapa sawit tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga menciptakan beban ekologis dan sosial yang harus ditanggung oleh komunitas sekitar.

Aktivitas industri PT Srigunung Inti Argo Persada memberikan dampak ganda bagi masyarakat Desa Srigunung. Dari sisi ekologis, kegiatan operasional perusahaan telah menimbulkan pencemaran air dan udara, yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Pencemaran tersebut muncul karena pengelolaan limbah industri kelapa sawit yang belum sepenuhnya memenuhi standar lingkungan hidup, ditambah dengan lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Namun, dari sisi sosial ekonomi, keberadaan perusahaan juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Hal ini tercermin dari penyerapan tenaga kerja lokal, stabilitas harga tandan buah segar (TBS) karena hasil panen petani langsung dikelola oleh perusahaan, serta adanya program

tanggung jawab sosial (CSR) seperti pembangunan sumur bor, fasilitas umum, dan infrastruktur desa lainnya. Selain itu, peningkatan pendapatan riil masyarakat di wilayah sekitar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan demikian, hubungan antara industri dan masyarakat di Desa Srigunung bersifat ambivalen: di satu sisi memperkuat ekonomi lokal, tetapi di sisi lain menimbulkan kerentanan ekologis dan ketidakadilan lingkungan yang memerlukan intervensi kebijakan dan pengawasan lebih kuat dari pemerintah untuk memastikan keberlanjutan ekologi sekaligus keadilan sosial bagi masyarakat terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, F., & Chamid, C. (2022, Januari). Identifikasi Dampak Keberadaan Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit terhadap Lingkungan berdasarkan Persepsi Masyarakat di Kelurahan Pematang Pudu Kabupaten Bengkalis. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 2(1), 17–27.
- Adiwibowo, S., & Ardhian, D. (2016). Peran dan Strategi Organisasi Non Pemerintah dalam Arena Politik Lingkungan Hidup. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*.
- Agustiningsih, T. (2020). Dampak Pencemaran Udara terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Industri Pengolahan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 18(1), 45–52.
- Astuti, R. (2013). Ekologi Politik REDD+: Kontestasi Politik, Modal, dan Pengetahuan. *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial*.
- Batubara, B. (2017). Ekologi Politis Air: Akses, Eksklusi, dan Resistensi. *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial*.
- Anugrah, T. (2022). Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus pada PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020). Disertasi, Universitas Islam Riau.
- Ayu, A. R. (2021). Pengaruh Keberadaan PT. Sawit Riau Makmur (SRM) terhadap Penggunaan Lahan, Sosial Ekonomi dan Lingkungan di Kepenghuluan Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Disertasi, Universitas Islam Riau.
- Apriyani, S. (2023). Kerjasama Pemerintah dan NGO dalam Pengarustamaan Isu dan Praktis Politik Lingkungan melalui Program Switch Asia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 22(1), 87–101.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Dewi, R. P., & Fatimah, S. (2020). Efektivitas AMDAL dalam Mengendalikan Pencemaran Lingkungan oleh Perusahaan Kelapa Sawit. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 14(2), 145–159.
- Daulay, R. (2023). Analisis Regulasi dan Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Limbah Industri Sawit. *Jurnal Notarius*.
- Diakses dari: <https://mubakab.go.id/> (25 Agustus 2025).
- Diakses dari: <https://www.adr-group.com/id/agribusiness> (25 Agustus 2025).
- Fauzie, H. R. (2022). Peran Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan

- Lingkungan di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Politik Indonesia*.
- Fauzi, M. (2021). Dampak Sosial Ekologis Pencemaran Lingkungan di Kawasan Industri Kelapa Sawit: Perspektif Ekologi Politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 25(1), 91–105.
- Hidayah, N. (2022). Analisis Dampak Pencemaran Lingkungan oleh Industri terhadap Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat Desa Srigunung. Skripsi, Universitas Jember.
- Herdiansyah, H. (2019). Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan di Perbatasan dalam Pendekatan Ekologi Politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 146–165.
- Istiana, I. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan akibat Pencemaran Air Limbah Pengolahan Ikan (Studi Kasus pada CV Pasific Harvest di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar). Disertasi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Kelana, E. P. (2020). Mewujudkan Good Governance di dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Lentera: Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, 4(5).
- Kamilah, S., & Ruhaeni, N. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin oleh PT. Damai Indah di Kabupaten Bandung. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 258–263.
- Martini, E., & Susanti, R. (2020). Keadilan Ekologis dan Perlindungan Hak Lingkungan Hidup di Masyarakat Desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 112–129.
- Muharram, S., Fadly, F., Aldhaliaa, D., Pebriandini, R., & Nabila, F. (2021). Politics of Ecology on Environmental Management in Regional Autonomy Perspective in Banjar Regency. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, 1(2), 80–87.
- Mayshito, S. (2021). Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus PT X di Kabupaten Kampar). Disertasi, Universitas Islam Riau.
- Mandela, M. F., & Ridwan, R. (2023). Aktivisme Masyarakat Desa Wadas dalam Menolak Pertambangan sebagai Bagian dari Ruang Politik.
- Nurfiana, E. (2021). Perlawanan Hegemoni Budaya di Era Globalisasi: Analisis Isi Poskolonial pada Produk Desain Instagram Kamengski. *Komunikasiana: Journal of Communication Studies*, 3(2), 91–108.
- Pakasi, D. T., & Purnamasari, M. (2024). Permanently Polluted Paradise? Gender Inequality, Care Work, and Community Acts to Waste Problems in West Nusa Tenggara, Indonesia. *Simulacra*, 7(2), 269–283.
- Putri, A. D., Wijayanti, A., & Nugroho, R. A. (2018). Pengaruh Limbah Padat Industri Kelapa Sawit terhadap Kualitas Tanah dan Air Tanah. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 16(2), 112–121.
- Prasetyo, A. (2021). Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Lingkungan*, 18(2), 91–102.
- Qosim, N. (2024). Withdrawn: Memperjuangkan Keadilan Ekologis.
- Rizkiani, M. (2021). Pengaruh Pencemaran Tanah terhadap Produktivitas Lahan Pertanian di Wilayah Industri. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(2), 89–97.

- Ridlo, M., & Yunus, M. (2024). Politik Ekologi Hijau (Perspektif Islam) dalam Kontestasi Pemilu 2024. *Humanistika*.
- Ramadhani, R. (2019). Dampak Pencemaran Udara oleh Industri Pengolahan Sawit terhadap Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 14(3), 211–220.
- Rachman, A., & Hidayat, R. (2021). CSR dan Tanggung Jawab Ekologis Perusahaan Kelapa Sawit terhadap Masyarakat Sekitar. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Lingkungan*, 12(1), 77–89.
- Soemarwoto, O. (2004). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Suriasumantri, J. S. (2007). *Ilmu dalam Perspektif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Satria, A. (2009). *Ekologi Politik Nelayan*. LKiS Pelangi Aksara.
- Siregar, H. (2023). Pengaruh Penerapan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan.
- Sigalingging, E. (2023). Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Sintong Abadi dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan).
- Safitri, D., & Syamsuadi, R. (2025). Koordinasi Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*.
- Setyawan, D. (2019). AMDAL sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran: Antara Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 9(3), 212–223.
- Sihombing, T. R., & Sitanggang, D. H. (2021). Analisis Kualitas Air Sungai yang Terkontaminasi Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 25(1), 39–47.
- Syahrul. (2024). “Hore bentar lagi pabrik sawit milik 8 koperasi di Muba beroperasi.” Diakses dari <https://www.elaeis.com> (25 Agustus 2025).
- Tambunan, S., Harahap, R., & Marpaung, B. (2020). Manajemen Limbah Pabrik Kelapa Sawit untuk Menekan Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Agroindustri*, 11(1), 54–63.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wijaya, H. (2024). Dampak Sosial Pencemaran Limbah Industri terhadap Masyarakat. Repository UMM.
- Widodo, D. (2017). Kualitas Air Sungai di Wilayah Industri: Studi Kasus Dampak Limbah Cair terhadap Kesehatan. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 23(1), 31–38.
- YPIDATHU Journal. (2022). Pendekatan Ekologi Politik dalam Mengkaji Ketimpangan Lingkungan di Kawasan Industri. [Journal.ypidathu.or.id](http://journal.ypidathu.or.id).
- Wahyudi, H., Anugerah, M. F., & Arif, M. (2021). Keterlibatan WALHI dalam Politik Lingkungan Hidup terhadap Kasus Kabut Asap di Riau. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*.